

ABSTRAK

Bantuan hukum termasuk Hak Asasi Manusia yang dijamin DUHAM. Bantuan hukum yang melekat sebagai hak asasi mensyaratkan untuk diberikan sesuai dengan prinsip hukum umum (*General principles of law*) terkait pemberian bantuan hukum yang salah satunya yaitu prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum. Namun Prajurit TNI tidak secara mutlak dapat didampingi oleh advokat pilihannya apabila berasal dari luar lingkungan TNI (non Militer) karena adanya kewenangan PAPERA dalam Pasal 216 ayat (1) UU Peradilan Militer. Kondisi ini menimbulkan pengurangan Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi terkait kewenangan PAPERA dalam Pasal 216 ayat (1) UU Peradilan Militer, karena aturan tersebut menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Prajurit jika ingin menggunakan bantuan hukum oleh advokat non militer pilihannya. Padahal Bantuan hukum yang melekat sebagai hak asasi mensyaratkan untuk diberikan sesuai dengan prinsip hukum umum (*General principles of law*) terkait pemberian bantuan hukum yang salah satunya yaitu prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum. Oleh karena itu, kewenangan PAPERA membatasi prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip kepentingan keadilan. Dengan demikian, hasil dari evaluasi yang dilakukan menimbulkan konsekuensi logis untuk memperbaiki rumusan Pasal 216 ayat (1) UU Peradilan Militer.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Advokat non militer, Kewenangan PAPERA

ABSTRACT

Legal aid is a Human Right guaranteed by the UDHR. Legal aid, inherent as a human right, requires that it be provided in accordance with general principles of law regarding the provision of legal aid, one of which is the principle of the right to choose a lawyer/legal aid provider. However, TNI soldiers cannot absolutely be accompanied by an advocate of their choice if they come from outside the TNI environment (non-military) due to the PAPERA authority in Article 216 paragraph (1) of the Military Court Law. This condition results in a reduction of Human Rights.

This research is a normative legal research. The approaches used are conceptual approach and statute approach.

The results of the study indicate that there is a need for an evaluation regarding PAPERA's authority in Article 216 paragraph (1) of the Military Justice Law, because this regulation is the main obstacle faced by Soldiers if they want to use legal assistance by a non-military advocate of their choice. In fact, legal assistance which is inherent as a basic right requires it to be provided in accordance with general principles of law regarding the provision of legal assistance, one of which is the principle of the right to choose a lawyer/legal aid provider. Therefore, PAPERA's authority limits the principle of the right to choose a lawyer/legal aid provider which is an inseparable part of the principle of the interests of justice. Thus, the results of the evaluation carried out have logical consequences for improving the formulation of Article 216 paragraph (1) of the Military Justice Law.

Keywords: Legal Aid, Non-Military Advocates, PAPERA's Authority